



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
INSPEKTORAT DAERAH

LAPORAN HASIL EVALUASI RISK REGISTER (RR)
TERHADAP KERTAS KERJA MANAJEMEN RISIKO

Obrik Yang Dievaluasi : Sekretariat Daerah
Kabupaten Lima Puluh Kota
Nomor Laporan : 700.1.2/ 465 /INSP-LK/2025
Tanggal : 31 Desember 2025
Tahun Evaluasi : 2026



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ketinggian GOR Singa Harau, Nagari Sarilamak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat 26271,
Laman inspektorat.limapuluhkotakab.go.id, Pos-el Inspektur@limapuluhkotakab.go.id

Nomor : 700/ ~~839~~ /INSP-LK/2025
Lampiran : 1 (satu) Laporan
Perihal : **Surat Pengantar Laporan**

Yth. Bupati Lima Puluh Kota

di

Sarilamak

Dengan ini disampaikan Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan nomor laporan dan objek sebagai berikut:

No.	Nomor laporan	Objek
1	700.1.2/ 465/INSP-LK/2025	Laporan Hasil Evaluasi Risk Register (RR) Sekretariat Daerah

Demikian disampaikan untuk Bapak ketahui dan maklumi.

Sarilamak, 31 Desember 2025

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



IRWANDI, S.Sos. MM, CGCAE, CGRE
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP.19660913 198603 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pelaksanaan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian internal Pemerintah
2. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 06 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.
6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
7. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 102 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.
8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
9. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 700/03/BUP-LK/I/2025 Tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025.
11. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 700.1.2/353/INSP-LK/2025 tanggal 04 Desember 2025.

B. Tujuan Evaluasi

1. Menilai keselarasan antara pernyataan risiko yang diidentifikasi dengan tujuan program yang ditetapkan pada rencana strategis unit kerja
2. Menilai ketepatan atas penetapan penyebab terjadinya risiko, penetapan skala kemungkinan dan skala dampak terjadinya risiko serta rencana tindak pengendalian
3. Memberikan saran perbaikan yang diperlukan untuk peningkatan kualitas dokumen daftar risiko dan dokumen Rencana Tindak Pengendalian unit kerja

C. Sasaran Evaluasi

Adapun sasaran yang ingin dicapai adalah :

1. Terumuskannya dengan baik risiko, penyebab dan dampak serta rencana tindak pengendalian untuk Risiko Strategis Pemerintah Daerah (RSP), Risiko Strategis OPD (RSO) dan Risiko Operasional OPD (ROO).
2. Tersedianya Berita Acara Evaluasi Risk Register Perangkat Daerah yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah terkait.
3. Tersedianya catatan, kesimpulan dan rekomendasi sebagai masukan untuk perbaikan Risk Register Perangkat Daerah terkait.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap Risk Register dan Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2026 yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah atas pencapaian tujuan program yang tertuang pada RPJMD, Rencana Strategis OPD, Renja dan RKA OPD.

E. Tim Evaluasi

Penanggung Jawab	:	Irwandi, S.Sos, MM, CGCAE, CGRE
Wakil Penanggung Jawab	:	Elfitria, AP
Pengendali Teknis	:	Iza Nudia, ST
Ketua Tim	:	Aldesra, SKM
Anggota	:	Reni Za Natalya, S.Sos
Anggota	:	Saproni, SE
Anggota	:	Tri Dia Hapsari, SE
Anggota	:	Dio Apri Maisya, ST

F. Jadwal Evaluasi

Evaluasi Risk Register dan Rencana Tindak Pengendalian dilaksanakan dari tanggal 04 s/d 19 Desember 2025 (12 Hari Kerja).

G. Metodologi Evaluasi

Penilaian dilaksanakan dengan melakukan telaahan sederhana, berbagai analisis dan pengukuran serta perbandingan atas kesesuaian pernyataan risiko dengan tujuan program yang telah ditetapkan unit kerja. Selanjutnya, terhadap risiko yang dimaksud dilakukan analisa penyebab terjadinya risiko dan dampak terjadinya risiko beserta skala kemungkinan dan skala dampak untuk menentukan skor dan level risiko. Jika ada ketidaksesuaian maka perlu dilakukan perbaikan. Hasil perbaikan dimaksud kemudian dibahas dengan unit kerja sebagai pemilik risiko untuk disepakati yang dituangkan dalam berita acara pembahasan.

RAHASIA

BAB II

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi manajemen risiko pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan pemetaan risiko terhadap 1 (satu) program strategis PD dan 11 (sebelas) kegiatan operasional PD yang bersumber dari dokumen RPJMD/ Renstra OPD sebagai berikut :

Risiko Strategis Pemda (RSP):

- 1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai 4 uraian risiko dengan Skala Risiko 12 .

Risiko Strategis OPD (RSO):

- 1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - a. Indikator Kinerja Indeks ABS-SBK, mempunyai 4 uraian Risiko dengan skala risiko 12.
 - b. Indikator Kinerja Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai 5 uraian Risiko dengan skala Risiko 10,8.
 - c. Indikator Kinerja Jumlah produk Hukum Daerah yang dipublikasikan melalui JDIH, mempunyai uraian 4 Risiko dengan skala Risiko 11,38.
- 2) Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.
 - d. Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah yang tersedia, mempunyai 3 uraian Risiko dengan skala Risiko 9.
 - e. Indikator Kinerja Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja, mempunyai 4 uraian Risiko dengan skala Risiko 12,25
 - f. Persentase Sarana dan Prasarana kantor dalam kondisi baik, mempunyai 5 uraian Risiko dengan skala Risiko 12.
- 3) Program Perekonomian dan Pembangunan dengan skala Risiko 16.
- 4) Program Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam mempunyai 4 uraian Risiko dengan skala Risiko 11,38.
- 5) Program Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai 3 uraian Risiko dengan skala Risiko 10.

Risiko Operasional OPD (ROO):

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai 4 uraian Risiko dengan skala risiko 10,5.
- 2) Fasilitas Kerja Sama Daerah. Mempunyai 2 uraian Risiko dengan skala risiko 10,5.

- 3) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, mempunyai 2 uraian Risiko dengan skala risiko 8.
 - 4) Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, mempunyai 2 uraian Risiko dengan skala risiko 10,5.
 - 5) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, mempunyai 6 uraian Risiko, dengan skala risiko 11.
 - 6) Pembinaan Sumber Daya Manusia, pendampingan, advokasi dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa, mempunyai 4 uraian dengan skala Risiko 12
 - 7) Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik, mempunyai 2 uraian Risiko dengan skala Risiko 10,5.
 - 8) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, mempunyai 4 uraian Risiko dengan skala Risiko 11,38.
 - 9) Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, mempunyai 3 uraian Risiko dengan skala Risiko 10.
 - 10) Fasilitasi Keprotokolan, mempunyai 3 uraian Risiko dengan skala Risiko 10.
 - 11) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, mempunyai 2 uraian Risiko dengan skala Risiko 12.
2. Pada Risiko Strategis Pemda terdapat perbaikan/perubahan setelah Evaluasi yaitu :
- 1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - a Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ perubahan :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Skala Kemungkinan	3	4
Rencana Tindak Pengendalian	Melaksanakan pelatihan SDM terkait bidang keagamaan	1.Melaksanakan pelatihan SDM Masyarakat terkait bidang keagamaan 2.Mengaktifkan remaja masjid dll

- b.Risiko ke-2 terdapat perbaikan/ perubahan :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Sebab	Kurangnya prioritas untuk peningkatan infrastruktur lembaga keagamaan	Kurangnya prioritas untuk peningkatan infrastruktur lembaga keagamaan (TPA/TPSA/MDA)

c. Risiko ke-3 terdapat perbaikan/ perubahan :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Sebab	Masih kurang sumber daya dan regulasi untuk penghimpunan dana dan pemberdayaan sosial ekonomi	1.Masih kurang sumber daya dan regulasi untuk penghimpunan dana dan pemberdayaan sosial ekonomi 2.Kurangnya kesadaran berzakat oleh ASN
Skala Kemungkinan	3	4

3. Pada Risiko Strategis OPD terdapat perbaikan/perubahan setelah Evaluasi yaitu :

1) Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan Indikator Kinerja Indeks ABS-SBK.

a. Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ perubahan :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Skala Kemungkinan	3	4
Rencana Tindak Pengendalian	Melaksanakan pelatihan SDM terkait bidang keagamaan	1.Melaksanakan pelatihan SDM Masyarakat terkait bidang keagamaan 2.Mengaktifkan remaja masjid dll

b.Risiko ke-2 terdapat perbaikan/ perubahan :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Sebab	Kurangnya prioritas untuk peningkatan infrastruktur lembaga keagamaan	Kurangnya prioritas untuk peningkatan infrastruktur lembaga keagamaan (TPA/TPSA/MDA)

c. Risiko ke-3 terdapat perbaikan/ perubahan :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Sebab	Masih kurang sumber daya dan regulasi untuk penghimpunan dana dan pemberdayaan sosial ekonomi	1.Masih kurang sumber daya dan regulasi untuk penghimpunan dana dan pemberdayaan sosial ekonomi 2.Kurangnya kesadaran berzakat oleh ASN

Skala Kemungkinan	3	4
-------------------	---	---

- 2) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan Indikator Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

a. Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Kode Risiko	RSO.26.01.99.02.01	1. RSO.26.99.02.01
Sumber	Eksternal dan Internal	Internal
C/UC	C	C

b. Risiko ke-2 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Kode Risiko	RSO.26.01.99.02.01	RSO.26.99.02.02
Sumber	Eksternal dan Internal	Internal
C/UC	C	C

c. Risiko ke-3 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Kode Risiko	RSO.26.01.99.02.01	RSO.26.99.02.03
Sumber	Eksternal dan Internal	Internal
C/UC	C	C

d. Risiko ke-4 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Kode Risiko	RSO.26.01.99.02.01	RSO.26.99.02.04
Sumber	Eksternal dan Internal	Internal
C/UC	C	C

e. Risiko ke-5 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Kode Risiko	RSO.26.01.99.02.01	RSO.26.99.02.05
Sumber	Eksternal dan Internal	Internal
C/UC	C	C

- 3) Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

a. Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Skala Kemungkinan	3	3

b. Risiko ke-3 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Skala Dampak	2	3
Skala Kemungkinan	4	3

4) Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

a. Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Kode Risiko	RSO.26.99.02	RSO.26.99.02.01
C/UC	C	UC

b. Risiko ke-2 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Kode Risiko	RSO.26.99.02	RSO.26.99.02.02
C/UC	C	UC

c. Risiko ke-3 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Kode Risiko	RSO.26.99.02	RSO.26.99.02.03
C/UC	C	UC

d. Risiko ke-4 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Kode Risiko	RSO.26.99.02	RSO.26.99.02.04
C/UC	C	UC

5) Program Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

a. Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Kode Risiko	RSO.26.99.02.01	RSO.26.27.02.01
Sumber	Eksternal/Internal	Eksternal

b. Risiko ke-2 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Kode Risiko	RSO.26.99.02.01	RSO.26.27.02.02
Sumber	Eksternal/Internal	Eksternal

c. Risiko ke-3 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Kode Risiko	RSO.26.99.02.01	RSO.26.27.02.03
Sumber	Eksternal/Internal	Eksternal

d. Risiko ke-4 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Kode Risiko	RSO.26.99.02.01	RSO.26.27.02.03
Sumber	Eksternal/Internal	Eksternal

6) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Kinerja Persentase Sarana dan Prasarana kantor dalam kondisi baik.

a. Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Sumber	Eksternal	Internal
C/UC	C	C

b. Risiko ke-2 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Sumber	Eksternal	Internal
C/UC	C	C

c. Risiko ke-3 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Sumber	Eksternal	Internal
C/UC	C	C

d. Risiko ke-4 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Sumber	Eksternal	Internal
C/UC	C	C

e. Risiko ke-5 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Sumber	Eksternal	Internal
C/UC	C	C

4. Pada Risiko Strategis OPD terdapat perbaikan/perubahan setelah Evaluasi yaitu :

1) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

a. Risiko ke-4 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Skala Dampak	3	4

2) Kegiatan Fasilitas Kerja Sama Daerah

a. Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Kode Risiko	ROO 26.99.02.01	ROO 26.99.02.01

b. Risiko ke-2 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Kode Risiko	ROO 26.99.02.01	ROO 26.99.02.01
Sebab	Kurangnya inisiatif OPD untuk perencanaan kerja sama	Belum adanya pedoman teknis identifikasi dan pemetaan kerja sama
Sumber	Internal dan Eksternal	Internal

3) Kegiatan Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah

a. Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Kode Risiko	ROO 26.99.02	ROO 26.99.02.01
Sebab	Kurang paham dalam membaca regulasi	Keterbatasan SDM OPD yang memiliki kompetensi penyusunan Produk Hukum Daerah
Rencana Tindak Pengendalian	Mengumpulkan data sesuai dengan skedul yang ditetapkan	Melaksanakan pendampingan dan konsultasi teknis antara Bagian Hukum dan OPD

4) Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

- Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

a. Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Skala Kemungkinan	3	4

b. Risiko ke-2 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Skala Kemungkinan	3	4

c. Risiko ke-3 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Skala Dampak	2	3
Skala Kemungkinan	2	4

d. Risiko ke-4 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Skala Dampak	2	3
Skala Kemungkinan	2	4

e. Risiko ke-6 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Skala Dampak	2	3

- Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, pendampingan, advokasi dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa

a. Risiko ke-7 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Skala Kemungkinan	3	4

b. Risiko ke-8 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Sebab	Tidak tersedianya anggaran yang memadai untuk kebutuhan peningkatan kapasitas para pelaku pengadaan	Kompetensi dan pemahaman regulasi PBJ pelaku PBJ belum memadai.
Skala Dampak	2	3

c. Risiko ke-9 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Skala Dampak	2	3
Skala Kemungkinan	2	4

d. Risiko ke-10 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Skala Dampak	2	3
Skala Kemungkinan	1	4

- Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik

a. Risiko ke-11 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Skala Dampak	2	3
Skala Kemungkinan	3	4
Rencana Tindak Pengendalian	Tepat waktunya Perangkat Daerah mengumumkan RUP sesuai dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RKA/DPA Kegiatan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kelengkapan dan ketepatan waktu pengumuman RUP

b. Risiko ke-12 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Sumber	Sumber	Internal
Skala Dampak	2	3
Rencana Tindak Pengendalian	Terlayannya pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja Pemilihan, dan atau Penyedia) yang efektif dan efisien dengan menggunakan media/sarana yang representatif	Menyediakan layanan helpdesk/pendampingan teknis PBJ secara elektronik.

5) Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

a. Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
C/UC	C	UC

b. Risiko ke-2 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
C/UC	C	UC

c. Risiko ke-3 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
C/UC	C	UC

6) Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan

a. Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Kode Risiko	ROO.26.99.02	ROO.26.99.02.01
Sumber	Eksternal	Internal
C/UC	UC	C

b. Risiko ke-2 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Kode Risiko	ROO.26.99.02	ROO.26.99.02.02
Sumber	Eksternal	Internal
C/UC	UC	C

c. Risiko ke-3 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Kode Risiko	ROO.26.99.02	ROO.26.99.02.03
Sumber	Eksternal	Internal
C/UC	UC	C

7) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Kode Risiko	ROO.26.99.02	ROO.26.99.02.01
Sebab	Banyaknya kebutuhan Sarana dan Prasarana yang harus disediakan serta anggaran yang terbatas	Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana belum optimal dan belum berbasis analisis kebutuhan
Sumber	Eksternal dan Internal	Internal
C/UC	UC	C
Rencana Tindak Pengendalian	Melakukan Evaluasi serta Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan terkait penyesuaian dan penambahan anggaran	Menetapkan prioritas pengadaan sarana dan prasarana berdasarkan urgensi dan ketersediaan anggaran

b. Risiko ke-2 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Kode Risiko	ROO.26.99.02	ROO.26.99.02.02
Sebab	Terbatasnya anggaran dalam memenuhi sarana dan prasarana partisi kantor, lemari arsip , gudang arsip dan gudang perlengkapan	Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana belum optimal dan belum berbasis analisis kebutuhan
Sumber	Eksternal dan Internal	Internal
C/UC	UC	C
Rencana Tindak Pengendalian	Melakukan Evaluasi serta Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan terkait penyesuaian dan penambahan anggaran	Menetapkan prioritas pengadaan sarana dan prasarana berdasarkan urgensi dan ketersediaan anggaran

5. Dalam pemberian Kode Risiko pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 terdapat Perbaikan sebagai berikut:

a. Kode Risiko Strategis OPD belum sesuai dengan ketentuan, seharusnya

Kode RSO: RSO.26.99.99.01 (arti kode : Tingkat Risiko. Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko. Jenis Risiko/Urusan Pemda. Entitas/OPD yang menilai. Nomor Urut di Entitas/OPD).

b. Kode Risiko Operasional OPD belum sesuai dengan ketentuan, seharusnya

Kode ROO: ROO.26.99.99.01 (arti kode : Tingkat Risiko. Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko. Jenis Risiko/Urusan Pemda. Entitas/OPD yang menilai. Nomor Urut di Entitas/OPD).

6. Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 belum disusun sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tanggal 21 Agustus 2019, yang ada hanya Kertas Kerja Laporan Pelaksanaan Pengendalian Risiko.
7. Diharapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota secara berkelanjutan melakukan pemantauan dan pembaruan jika ada risiko baru yang muncul/belum diidentifikasi oleh manajemen dengan melakukan evaluasi internal atas pernyataan risiko, penilaian risiko dan penilaian rencana tindak pengendalian.

B. REKOMENDASI

Inspektorat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota merekomendasikan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota agar :

- 1) Melakukan perbaikan/penambahan terhadap pernyataan risiko kegiatan, penyebab risiko, dampak dan RTP yang belum memenuhi menghilangkan penyebab risiko pada Kertas Kerja Penilaian Risiko Sekretariat Daerah sesuai dengan hasil berita acara pembahasan terlampir.
- 2) Menyusun Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 (sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tanggal 21 Agustus 2019).
- 3) Melakukan pemantauan dan pembaharuan secara berkala jika ada risiko baru yang muncul/belum diidentifikasi oleh manajemen dengan melakukan evaluasi internal atas pernyataan risiko, penilaian risiko dan penilaian efektivitas rencana tindak pengendalian, agar efektivitas penerapan manajemen risiko diseluruh level organisasi dapat terjamin.

BAB III
PENUTUP

Demikianlah Laporan Hasil Evaluasi atas Risk Register dan Rencana Tindak Pengendalian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



IRWANDI, S.Sos, MM, CGCAE, CGRE
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19660913 198603 1 009

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota.

SETELAH EVALUASI

SETelah Evaluasi															RATA-RATA NILAI RISIKO		
Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/U/C	Dampak		Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Nilai Risiko	Rencana Tindak Pengendalian	Rata-rata Level Dampak	Rata-rata Level Kemungkinan	Skala Risiko Komposit	
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena					(30)	(31)	(32)	
(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	
RESIKO STRATEGIS PEMDA																	
Tujuan :																	
Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas																	
Sasaran :																	
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indek ABS-SBK	Sumber Daya Manusia terkait dengan bidang keagamaan yang masih rendah	RSP.26.99.02.01	Kepala Daerah	Sarana pendidikan agama yang masih kurang dan rendahnya minat masyarakat untuk pendidikan agama	Internal	C	Jumlah SDM yang dibutuhkan dalam bidang keagamaan tidak mencukupi	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait	3	4	12	1. Melaksanakan pelatihan SDM Masyarakat terkait bidang keagamaan 2. Mengaktifkan remaja masjid dll	3	4	12	
		Infrastruktur dan kelembagaan keagamaan masih kurang	RSP.26.99.02.02	Kepala Daerah	Kurangnya prioritas untuk peningkatan infrastruktur lembaga keagamaan (TPA/TPSAMDA)	Internal	C	Tidak mencukupi infrastruktur kelembagaan keagamaan	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait	3	4	12	Memberikan bantuan hibah kepada lembaga keagamaan				
		Belum optimal penghimpunan dana sosial dan pemberdayaan sosial ekonomi	RSP.26.99.02.03	Kepala Daerah	1.Masih kurang sumber daya dan regulasi untuk penghimpunan dana dan pemberdayaan sosial ekonomi 2.Kurangnya kesadaran berzakat oleh ASN	Internal	C	Pemberdayaan sosial ekonomi di masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait	3	4	12	1.Bekerjasama dengan BAZNAS dalam rangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat 2. Sosialisasi/timbuhan berzakat bagi ASN				
		Kepesertaan jaminan sosial tenaga dan fasilitator balak basuzu masih rendah	RSP.26.99.02.04	Kepala Daerah	Jaminan sosial yang tidak terpenuhi	Internal	C	1. produktivitas tenaga dan fasilitator balak basuzu menurun, 2. rentan dan tidak tercapainya perlindungan sosial dan ekonomi tenaga dan fasilitator balak basuzu	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait	3	4	12	Memberikan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi tenaga dan fasilitator balak basuzu				
REBIKO STRATEGIS OPD																	
Tujuan :																	
Mewujudkan koordinasi pemerintahan dan otonomi daerah yang berkualitas																	
Sasaran :																	
Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat																	
Program :																	
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Indeks ABS-SBK	Sumber Daya Manusia terkait dengan bidang keagamaan yang masih rendah	RSO 26.99.02.01	Kepala Daerah / Setda	Sarana pendidikan agama yang masih kurang dan rendahnya minat masyarakat untuk pendidikan agama	Internal	C	Jumlah SDM yang dibutuhkan dalam bidang keagamaan tidak mencukupi	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait	3	4	12	1 Melaksanakan pelatihan SDM Masyarakat terkait bidang keagamaan 2 Mengaktifkan remaja masjid dll	3	4	12	

		Infrastruktur dan kelembagaan keagamaan masih kurang	RSO.26.99.02.02	Kepala Daerah / Setda	Kurangnya prioritas untuk peningkatan infrastruktur lembaga keagamaan (Masjid/TPA/TPSAMD A)	Internal	C	Tidak mencukupi infrastruktur kelembagaan keagamaan	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait	3	4	12	Memberikan bantuan hibah kepada lembaga keagamaan			
		Belum optimal penghimpunan dana sosial dan pemberdayaan sosial ekonomi	RSO 26.99.02.03	Kepala Daerah / Setda	1.Masih kurang sumber daya dan regulasi untuk penghimpunan dana dan pemberdayaan sosial ekonomi 2.Kurangnya kesadaran berzakat oleh ASN	Internal	C	Pemberdayaan sosial ekonomi di masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait	3	4	12	1 Bekerjasama dengan BAZNAS dalam rangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat 2. Sosialisasi/himbauan berzakat bagi ASN			
		Kepesertaan jaminan sosial tenaga dan fasilitator balaiq basureau masih rendah	RSO.26.99.02.04	Kepala Daerah / Setda	Jaminan sosial yang tidak terpenuhi	Internal	C	1. produktifitas tenaga dan fasilitator balaiq basureau menurun, 2. rentan dan tidak tercapainya perlindungan sosial	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait	3	4	12	Memberikan jaminan kecetakan kerja dan jaminan kematian bagi tenaga dan fasilitator balaiq basureau			
Sasaran : Meningkatnya fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat																
Program : Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Pemahaman terhadap indikator Kinerja Kunci yang belum sama	RSO 26.99.02.01	Kepala Daerah / Setda	Peraturan yang mengatur berubah dan SDM yang melaksanakan penyusunan laporan masih rendah	Internal	C	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak maksimal	Kepala Daerah, OPD terkait	3	3	9	Bimtek dilaksanakan untuk Kepala OPD dan pejabat yang bertanggung jawab untuk menyusun laporan	3	3.6	10.8
		Keseriusan Pejabat pengambil keputusan pada OPD masih minim	RSO.26.99.02.02	Kepala Daerah / Setda	Pergantian Pejabat pada saat penyusunan laporan	Internal	C	Nilai EKPPD tidak maksimal	Kepala Daerah, OPD terkait	3	4	12	Menyampaikan surat teguran pada OPD Teknis yang belum memenuhi permintaan data indikator Kinerja Kunci			
		Pelaksanaan Rapat Koordinasi belum maksimal	RSO 26.99.02.03	Kepala Daerah / Setda	Padaatnya kegiatan pejabat OPD	Internal	C	Rapat Koordinasi tidak terlaksana	Kepala Daerah, OPD terkait	3	3	9	Teguran dari Pimpinan bagi Ka OPD yang tidak menghadiri Rapat Koordinasi			
		Identifikasi dan Pemetaan kerja sama dan OPD belum Optimal	RSO.26.99.02.04	Kepala Daerah / Setda	kurangnya inisiatif OPD untuk perencanaan kerja sama	Internal	C	Rencana Kerja Sama tidak didukung oleh APBD	Kepala Daerah, OPD terkait	3	4	12	Penambahan anggaran untuk pelaksanaan bimtek bagi OPD			
		Pemahaman OPD teknis terhadap Peraturan kerja sama kurang	RSO 26.99.02.05	Kepala Daerah / Setda	kurangnya sosialisasi terhadap peraturan kerja sama baik yang umum maupun teknis	Internal	C	Tujuan Kerja Sama tidak tercapai	Kepala Daerah, OPD terkait	3	4	12	Penambahan Anggaran untuk pelaksanaan Sosialisasi			
Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum yang efektif dan efisien																
Program : Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah yang tersedia	1. Bahan kelengkapan laporan tidak tersedia sesuai kebutuhan laporan yang mengakibatkan data tidak akurat	RSO.26.99.02.01	Kabag Perencanaan dan Keuangan, Sub Koordinator Perencanaan, Sub Koordinator Keuangan, dan Sub Koordinator Pelaporan	data tidak tersedia dari stakeholder	Internal	C	Dokumen pelaporan tidak disejajarkan dengan benar	Sekretariat Daerah	3	3	9	Adanya ketegasan pimpinan berupa peraturan tertulis dan tentatif tentang jadwal pemenuhan kebutuhan dokumen SPJ	3	3	9
		2. Penyusunan dokumen tidak lengkap yang menghambat proses penyusunan dokumen	RSO 26.99.02.02	Kabag Perencanaan dan Keuangan, Sub Koordinator Perencanaan, Sub Koordinator Keuangan, dan Sub Koordinator Pelaporan	Dokumen pendukung laporan keuangan yang tidak memadai	Internal	C	dokumen pelaporan tidak disusun tepat waktu	Sekretariat Daerah	3	3	9	Adanya ketegasan pimpinan berupa peraturan tertulis dan tentatif tentang jadwal pemenuhan kebutuhan dokumen SPJ			
		3. Terangnya Jaringan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang mengakibatkan terhambatnya penyusunan Laporan yang berbasis aplikasi	RSO.26.99.02.03	Kabag Perencanaan dan Keuangan, Sub Koordinator Perencanaan, Sub Koordinator Keuangan, dan Sub Koordinator Pelaporan	Jaringan/ Peralatan internet yang tidak memadai	Eksternal	C	dokumen pelaporan tidak disusun tepat waktu	Sekretariat Daerah	3	3	9	Peningkatan SDM operator jaringan SIPKD dan jaringan SIPD			

[illegible]

Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terwujudnya Fasilitas Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sesuai Standar Keprotokolan yang Bertaku	Sumber Daya Manusia terkait dengan bidang protokol dan komunikasi pimpinan yang masih rendah	RSO.26.99.02.01	Kepala Daerah	Tidak Linear antara tugas dan fungsi dengan latar belakang pendidikan	Internal	C	Perlu dinesarkan sumber daya manusia yang ada sesuai bidang nya	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait	3	3	9	Melaksanakan pelatihan SDM terkait dengan keprotokolan	3	3.3	10
		Sarana dan Prasarana kurang memadai	RSO.26.99.02.02	Kepala Daerah	Tidak tersedianya peralatan untuk dokumentasi pimpinan dan kurang nya operasional	Internal	C	Tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait	3	4	12	Memberikan anggaran untuk sarana dan prasarana			
		Belum optimalnya pemahaman organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah terhadap tugas dan fungsi Protokol dan Komunikasi Pimpinan	RSO.26.99.02.03	Kepala Daerah	Kurangnya Pemahaman Organisasi Perangkat Daerah terhadap tugas dan Fungsi Protokol dan Komunikasi Pimpinan sehingga kurang efektifnya informasi yang diterima terkait agenda kegiatan pimpinan	Internal	C	Kurang terorganisir agenda kegiatan pimpinan	Kepala Daerah, Masyarakat, OPD terkait	3	3	9	Bekerjasama dengan organisasi perangkat daerah dengan protokol dan komunikasi pimpinan			
Besaran: Terwujudnya Pelayanan Administrasi Umum yang efektif dan efisien Program																
Program Penunjang Unsuran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana kantor dalam kondisi baik	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana partis kantor, lemari arsip, gudang arsip dan gudang perlengkapan	RSO.26.99.02.01	Setda / Bagian Umum / Sub Bagian Perlengkapan	Banyaknya kebutuhan Sarana dan Prasarana yang harus disediakan serta anggaran yang terbatas	Internal	C	Tidak terpenuhinya sarana dan prasarana partis kantor, lemari arsip, gudang arsip dan gudang perlengkapan	Kepala Bagian Umum, Sub Koordinator Perlengkapan	3	4	12	Melakukan Evaluasi serta Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan terkait penyesuaian dan penambahan anggaran	3	4	12
		Belum terpenuhinya kebutuhan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	RSO.26.99.02.02	Setda / Bagian Umum / Sub Bagian Perlengkapan	Banyaknya kebutuhan penyediaan dan perlengkapan alat-alat kebersihan serta anggaran yang terbatas	Internal	C	Tidak terpenuhinya kebutuhan penyediaan dan perlengkapan alat-alat kebersihan	Kepala Bagian Umum, Sub Koordinator Perlengkapan	3	4	12	Melakukan Evaluasi serta Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan terkait penyesuaian dan penambahan anggaran			
		Belum optimalnya pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor	RSO.26.99.02.03	Setda / Bagian Umum/ Sub Bagian Rumah Tangga	Banyaknya biaya yang diperlukan untuk pemeliharaan aula, parkir dan konstruksi atap	Internal	C	Tidak optimalnya pemeliharaan dan rehabilitasi gedung kantor	Kepala Daerah, Pejabat Eselon II, III, IV, Kepala Bagian Umum, Sub Koordinator Perlengkapan, Pegawai di OPD	3	4	12	Melakukan Evaluasi serta Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan terkait penyesuaian dan penambahan anggaran			
		Belum optimalnya pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	RSO.26.99.02.04	Setda / Bagian Umum / Sub Bagian Perlengkapan	Banyaknya komputer, printer dan sarana lainnya yang memerlukan pemeliharaan	Internal	C	Terhambatnya pelaksanaan tugas kadnasan	Kepala Daerah, Pejabat Eselon II, III, IV, Kepala Bagian Umum, Sub Koordinator Perlengkapan, Pegawai di OPD	3	4	12	Melakukan Evaluasi serta Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan terkait penyesuaian dan penambahan anggaran			
		Belum terkondisinya pemeliharaan kendaraan dinas operasional	RSO.26.99.02.05	Setda / Bagian Umum / Sub Bagian Perlengkapan	Mesin kendaraan memiliki umur mesin yang berbeda	Internal	C	Terhambatnya pelaksanaan tugas kadnasan	Kepala Daerah, Pejabat Eselon II, III, IV, Kepala Bagian Umum, Sub Koordinator Perlengkapan, Pegawai di OPD	3	4	12	Melakukan Evaluasi serta Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan terkait penyesuaian dan penambahan anggaran			
RESIKO OPERASIONAL OPD																
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan terkait dengan kesejahteraan rakyat yang terkoordinasi	Keterlambatan penyelesaian perbup tentang pedoman penilaian Indeks ABS-SBK	ROO.26.99.02.01	Setda / Bagian Kesra	Keterlambatan memahami dan menyepakati Indeks yang akan menjadi pedoman penilaian	Internal	C	Kegiatan terlambat dilaksanakan karena menunggu regulasi	Kepala Daerah, Setda	4	3	12	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD dan stakeholders	3,50	3,00	10,5
		Pengumpulan data tidak lengkap dan tidak tepat waktu	ROO.26.99.02.02	Setda / Bagian Kesra	Data yang ambil dari seluruh nagari tidak lengkap dan terlambat di kumpulkan	Internal	C	Terlambatnya pengolaian data	Kepala Daerah, Setda	3	3	9	Mengumpulkan data sesuai dengan skedul yang ditetapkan			
		Data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan indikator yang ditetapkan	ROO.26.99.02.03	Setda / Bagian Kesra	Kurang paham tugas pengumpul data dan kurang koordinasi dengan tim	Internal	C	Keterlambatan penilaian Indeks ABS-SBK	Kepala Daerah, Setda	3	3	9	Pengumpulan data sesuai kriteria dan prosedur yang ditetapkan dalam Perbup			
		Penyesuaian dan penambahan anggaran untuk jaminan sosial tenaga dan fasilitator balak basuru	ROO.26.99.02.04	Setda / Bagian Kesra	Jaminan sosial yang tidak terpenuhi	Internal	C	1. produktifitas tenaga dan fasilitator balak basuru menurun 2. rentan dan tidak tercapainya	Kepala Daerah, Setda	4	3	9	Memberikan jaminan kekeluargaan kerja dan jaminan kesehatan bagi tenaga dan fasilitator balak basuru			
Fasilitas Kerja Sama Daerah	Persentase Pelaksanaan fasilitasi Kerja Sama Daerah	Data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan indikator yang ditetapkan	ROO.26.99.02.01	Setda / Bagian Pemerintahan	Pengisian formasi keanggotaan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah telah diatur secara baku oleh peraturan perundang-undangan	Ektelmal	C	Hasil Kesepakatan Bersama tidak maksimal	Kepala Daerah, Setda	4	3	12	Pengumpulan data sesuai indikator yang telah ditetapkan permendagri	3,5	3	10,5

		Identifikasi dan Pemetaan kerja sama dari OPD belum Optimal	ROO.26.99.02.01	Selda / Bagian Pemerintahan	Belum adanya pedoman teknis identifikasi dan pemetaan kerja sama	Internal	C	Rencana Kerja Sama tidak didukung oleh APBD	Kepala Daerah, Selda	3	3	9	Penambahan anggaran untuk pelaksanaan Bimtek bagi OPD Menyusun pedoman identifikasi dan pemetaan kerja sama OPD			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD	Bahan kelengkapan laporan tidak tersedia sesuai kebutuhan laporan yang mengakibatkan data tidak akurat	ROO.26.99.02.01	Kabag Perencanaan dan Keuangan, Sub Koordinator Perencanaan, Sub Koordinator Keuangan, dan Sub Koordinator Pelaporan	Data tidak tersedia dari stakeholder	Internal	C	Dokumen pelaporan tidak disajikan dengan benar	Sekretariat Daerah	3	2	6	Adanya ketegasan pimpinan berupa peraturan tertulis dan tentatif tentang jadwal pemenuhan kebutuhan dokumen SPJ	2,67	3,00	8
		Penyusunan dokumen tidak lengkap yang menghambat proses penyusunan dokumen	ROO.26.99.02.02	Kabag Perencanaan dan Keuangan, Sub Koordinator Perencanaan, Sub Koordinator Keuangan, dan Sub Koordinator Pelaporan	Dokumen pendukung laporan keuangan yang tidak memadai	Internal	C	Dokumen pelaporan tidak disusun tepat waktu	Sekretariat Daerah	3	3	9	Adanya ketegasan pimpinan berupa peraturan tertulis dan tentatif tentang jadwal pemenuhan kebutuhan dokumen SPJ			
		Terganggunya jaringan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang mengakibatkan terhambatnya penyusunan Laporan yang berbasis aplikasi.	ROO.26.99.02.03	Kabag Perencanaan dan Keuangan, Sub Koordinator Perencanaan, Sub Koordinator Keuangan, dan Sub Koordinator Pelaporan	Jaringan/ Peralatan Internet yang tidak memadai	Internal	UC	Dokumen pelaporan tidak disusun tepat waktu	Sekretariat Daerah	2	4	8	Peningkatan SDM operator jaringan SIPD dan jaringan SIPD			
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Perda yang ditetapkan	Keterlambatan dalam proses harmonisasi terhadap Produk Hukum Daerah di Kanwil Kemenkumham	ROO.26.99.02.01	Selda / Bagian Hukum	Banyaknya Kab/Kota Di Sumatera Barat Yang Juga melaksanakan Harmonisasi Terhadap Produk Hukum Daerah di Kanwil Kemenkumham	Eksternal	UC	Kegiatan terlambat dilaksanakan karena menunggu regulasi	Kepala Daerah, Selda	4	3	12	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD dan stakeholders	3,5	3	10,5
		Keterlambatan OPD dalam memperbaiki hasil harmonisasi Produk Hukum Daerah	ROO.26.99.02.02	Selda / Bagian Hukum	Keterbatasan SDM OPD yang memiliki kompetensi penyusunan Produk Hukum Daerah	Internal	C	Terlambatnya Produk Hukum Daerah untuk di fasilitasi	Kepala Daerah, Selda	3	3	9	Melaksanakan pendampingan dan konsultasi teknis antara Bagian Hukum dan OPD			
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persentase kegiatan terkait dengan pengadaan barang/jasa pada aplikasi SPSE	Perangkat Daerah dalam menyusun Perencanaan Pengadaan dalam tahun berjalan, sama dengan waktu pelaksanaan fisiknya	ROO.26.33.02.01	Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen	Belum maksimalnya Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran (PA) melaksanakan perencanaan kegiatan yang berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku	Internal	C	1. Terlambatnya untuk memulai pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Perangkat Daerah 2. Tidak selesainya Pengadaan Barang/Jasa di akhir tahun anggaran	PA, PPK, dan penyedia	3	4	12	Pengguna Anggaran (PA) harus disiplin dalam mengingatkan PPK dan Pengelola Kegiatan untuk menyusun Perencanaan dalam Tahun Berjalan	3	3,67	11,00
		Tidak tepat waktunya Perangkat Daerah dalam menyusun, menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) di Aplikasi SIRUP.	ROO.26.33.02.02	Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen	Belum maksimalnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran (PA) dalam menyusun, menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) di Aplikasi SIRUP	Internal	C	1. Terlambatnya untuk memulai pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Perangkat Daerah 2. Tidak selesainya Pengadaan Barang/Jasa di akhir tahun anggaran	PA, PPK, dan penyedia	3	4	12	Pengguna Anggaran (PA) harus disiplin dalam mengingatkan PPK dan Pengelola Kegiatan untuk menyusun, menetapkan dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) di Aplikasi SIRUP.			
		Terlambatnya Perangkat Daerah dalam menyampaikan dokumen tendernya ke UKPBJ Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Proses Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa	ROO.26.33.02.03	Pejabat Pembuat Komitmen	Belum maksimalnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengguna Anggaran (PA) dalam melaksanakan proses Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa	Internal	C	1. Terlambatnya untuk memulai pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Perangkat Daerah 2. Tidak selesainya Pengadaan Barang/Jasa di akhir tahun anggaran	Pokja Pemilihan	3	4	12	Pengguna Anggaran (PA) harus disiplin dalam mengingatkan PPK dan Pengelola Kegiatan untuk menyampaikan dokumen tendernya ke UKPBJ Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Proses Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa tepat waktu			
		Tidak terlaksananya Pengendalian Kontrak	ROO.26.33.02.04	Pejabat Penandatanganan Kontrak	Belum maksimalnya Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam melaksanakan Pengendalian kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku	Internal	C	1. Tidak selesainya Pengadaan Barang/Jasa di akhir tahun anggaran 2. Menimbulkan persoalan hukum dibelakang hari	PPK Kegiatan	3	4	12	Pengguna Anggaran (PA) harus disiplin dalam mengingatkan PPK dan Pengelola Kegiatan untuk melakukan Pengendalian Kontrak dengan mempedomani peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku			
		Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan pengadaan belum sepenuhnya memperhatikan ketentuan penggunaan Produk Dalam Negeri	ROO.26.33.02.05	Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen	Belum maksimalnya Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam memahami penggunaan Produk Dalam Negeri	Internal	C	Hasil Pengadaan Barang/Jasa tidak memenuhi ketentuan penggunaan Produk Dalam Negeri	PA, PPK, dan penyedia	3	3	9	Pengguna Anggaran dalam menetapkan perencanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memperhatikan penggunaan Produk Dalam Negeri			

		Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan pengadaan belum sepenuhnya memprioritaskan penyelenggaraan katalog lokal	ROO.26.33.02.06	Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen	Belum maksimalnya Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam memprioritaskan penyelenggaraan katalog lokal	Internal	C	Tidak maksimalnya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi yang berasal dari APBD	PPK Kegiatan, pelaku UMKM	3	3	9	Pejabat Pembuat Komitmen dalam menyusun pemakatan pektean agar memprioritaskan pemanfaatan katalog(nasional, sektoral, lokal)			
Pembinaan Sumber Daya Manusia, pendampingan, advokasi dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa	Tertindakannya kegiatan pembinaan kepada pelaku pengadaan	Para pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Pojka Pemilihan dan Pejabat Pengadaan) yang WAJIB berasal dari Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa terhitung Tanggal 1 Januari 2021	ROO.26.33.02.07	Perangkat Daerah (Pojka Pemilihan dan Pejabat Pengadaan)	Belum dimulainya proses pengangkatan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Internal	C	1. Tidak terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa yang efektif, efisien, dan akuntabel. 2. Para pelaku Pengadaan rentan terhadap persolan hukum dibelakang hari	PA, PPK, UKPBJ	3	4	12	Masing-masing Perangkat Daerah dan UKPBJ segera melakukan perhitungan analisis jabatan (anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) untuk kebutuhan jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pementah di lingkungan kerja masing-masing	3	4	12,00
		Para pelaku Pengadaan Barang/Jasa yang tidak profesional dan handal dalam melaksanakan tugas-tugas Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan yang berlaku	ROO.26.33.02.08	Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (PA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pojka Pemilihan, dan atau Penyedia)	Kompetensi dan pemahaman regulasi PBJ pelaku PBJ belum memadai	Internal	C	1. Tidak terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa yang efektif, efisien, dan akuntabel. 2. Para pelaku Pengadaan rentan terhadap persolan hukum dibelakang hari	PA, PPK, Penyedia, PP, Pojka Pemilihan	3	4	12	Penganggaran kegiatan Bimbingan Teknis dan Pelatihan Teknis fungsional untuk peningkatan kapasitas bagi Para Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (PA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pojka Pemilihan, dan atau Penyedia)			
		Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	ROO.26.33.02.09	Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (PA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pojka Pemilihan)	Belum maksimalnya pelaksanaan penyusunan Tata Naskah Dinas, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait dengan Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa	Internal	C	1. Tidak terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa yang efektif, efisien, dan akuntabel. 2. Para pelaku Pengadaan rentan terhadap persolan hukum dibelakang hari	PPK, PP, Pojka Pemilihan	3	4	12	Penyediaan Tata Naskah Dinas, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait dengan Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku			
		Tidak terlaksananya proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	ROO.25.33.02.10	Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (PA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pojka Pemilihan)	Belum maksimalnya Perangkat Daerah dalam memanfaatkan "Klinik Pengadaan Barang/Jasa" yang ada di Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	Internal	C	1. Tidak terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa yang efektif, efisien, dan akuntabel. 2. Para pelaku Pengadaan rentan terhadap persolan hukum dibelakang hari	PPK, PA, Pojka Pemilihan, PP	3	4	12	Aktifnya Perangkat Daerah memanfaatkan UKPBJ sebagai sarana untuk pendampingan dan wahana konsultasi bagi para pelaku pengadaan			
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Tertelolanya pelaksanaan pengadaan melalui aplikasi SPSE	Tidak seluruh belanja Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan oleh SKPD pada aplikasi SIRUP	ROO.26.33.02.11	Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen yang dibantu oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Belum maksimalnya pemahaman dari Pengelola Sub Kegiatan terkait pentingnya pengumuman RUP di Aplikasi SIRUP dapat dilakukan sebelum OPA ditetapkan	Internal	C	1. Tidak terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa yang tepat waktu 2. Kurangnya transparansi pengumuman belanja daerah kepada masyarakat luas	PA, PPK, Penyedia	3	4	12	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kelengkapan dan ketepatan waktu pengumuman RUP	3	3,50	10,5
		Belum maksimalnya pelayanan administrasi secara elektronik kepada pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Pojka Pemilihan, dan atau Penyedia)	ROO.26.33.02.12	Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Masih belum representatifnya sarana dan prasarana untuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Internal	C	1. Tidak maksimalnya pelayanan kepada pelaku Pengadaan Barang/Jasa 2. Prinsip Pengadaan Barang/Jasa yang efektif, efisien, dan akuntabel belum sepenuhnya tercapai	PA, PPK, PP, Pojka Pemilihan, penyedia	3	3	9	Menyediakan layanan helpdesk/pendampingan teknis PBJ secara elektronik			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pementah Daerah	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pementah daerah	Pengumpulan data tidak tepat waktu dan tidak lengkap	ROO.26.99.02.01	Setda / Bagian Organisasi	Data pada perangkat daerah belum lengkap	Internal	C	Terlambatnya pengolahan data	Setda	3	4	12	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD dan stakeholders	3,5	3,5	12,25
		Keterlambatan perangkat daerah menyampaikan data pelengkap	ROO.26.99.02.02	Setda / Bagian Organisasi	Kurangnya koordinasi perangkat daerah dalam mengumpulkan data	Internal	C	Terlambatnya penyusunan laporan	Setda	3	4	12	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD dan stakeholders			
		Laporan belum sesuai dengan indikator yang ditetapkan	ROO.26.99.02.03	Setda / Bagian Organisasi	Kurangnya pengetahuan perangkat daerah tentang kesesuaian indikator perencanaan dan pelaporan	Internal	C	Rendahnya nilai evaluasi internal	Setda	4	3	12	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD dan stakeholders			
		Laporan belum sesuai dengan indikator penilaian dari Kementerian	ROO.26.99.02.04	Setda / Bagian Organisasi	Dokumen perencanaan belum sepenuhnya memiliki tujuan dan strategis yang mampu menjawab isu strategis yang dijawabnya	Internal	C	Rendahnya nilai SAKIP	Setda	4	3	12	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD dan stakeholders			
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase kegiatan terkait dengan perekonomian dan sumber daya alam yang terkoordinasi	keterlambatan penyaluran pupuk	ROO.26.99.02.01	Setda / Bagian Perekonomian dan SDA	keterlambatan laporan/pengadaan dan masyarakat/kelompok tani	Eksternal	UC	Kegiatan tertambat dilaksanakan karena menunggu regulasi	Setda	4	3	12	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD dan stakeholders	3,3	3,0	10

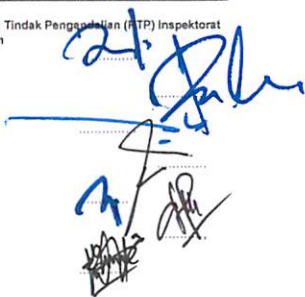
		Pengumpulan data tidak lengkap dan tidak tepat waktu	ROO.26.99.02.02	Selda / Bagian Perekonomian dan SDA	Data yang diambil dari seluruh kios yang ada dinagari tidak lengkap dan terlambat di kumpulan	Eksternal	UC	Terlambatnya pengolahan data	Selda	3	3	9	Mengumpulkan data sesuai dengan skedul yang ditetapkan			
		Data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan indikator yang ditetapkan	ROO.26.99.02.03	Selda / Bagian Perekonomian dan SDA	Kurang paham petugas pengumpul data dan kurang koordinasi dengan tim	Eksternal	UC	Keterlambatan dalam penyelesaian permasalahan	Selda	3	3	9	Pengumpulan data sesuai kriteria dan prosedur yang ditetapkan dalam Perbup			
Fasilitasi Keprotokolan	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah	Keterlambatan penyelesaian SOP Protokol dan Komunikasi Pimpinan	ROO.26.99.02.01	Selda / Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Keterlambatan memahami tentang standar pelayanan operasional protokol dan komunikasi pimpinan	Internal	C	Kegiatan terlambat dilaksanakan karena menunggu proses SOP	Kepala Daerah, Selda	4	3	12	Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Bagian Organisasi	3,33	3	10
		Pengumpulan data tidak lengkap dan tidak tepat waktu	ROO.26.99.02.02	Selda / Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Data yang ambil dari seluruh nagari tidak lengkap dan terlambat di kumpulan	Internal	C	Terlambatnya pengolahan data	Kepala Daerah, Selda	3	3	9	Mengumpulkan data sesuai dengan skedul yang ditetapkan			
		Data yang dikumpulkan tidak sesuai dengan indikator yang ditetapkan	ROO.26.99.02.03	Selda / Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kurang paham petugas pengumpul data dan kurang koordinasi dengan tim	Internal	C	Keterlambatan penilaian SOP Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kepala Daerah, Selda	3	3	9	Pengumpulan data sesuai kriteria dan prosedur yang ditetapkan dalam Perbup			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana kantor dalam kondisi baik	Belum terpenuhinya sarana dan prasarana partisi kantor, lemari arsip, gudang arsip dan gudang perlengkapan	ROO.26.99.02.01	Selda / Bagian Umum / Sub Bagian Perlengkapan	Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana belum optimal dan belum berbasis analisis kebutuhan	Internal	C	Tidak terpenuhinya sarana dan prasarana partisi kantor, lemari arsip, gudang arsip dan gudang perlengkapan sehingga pelaksanaan kegiatan bisa terganggu	Kepala Bagian Umum, Sub Koordinator Perlengkapan	3	4	12	Menetapkan prioritas pengadaan sarana dan prasarana berdasarkan urgensi dan ketersediaan anggaran	3	4	12
		Tidak terpenuhinya sarana dan prasarana partisi kantor, lemari arsip, gudang arsip dan gudang perlengkapan	ROO.26.99.02.02	Selda / Bagian Umum / Sub Bagian Perlengkapan	Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana belum optimal dan belum berbasis analisis kebutuhan	Internal	C	Tidak terpenuhinya sarana dan prasarana partisi kantor, lemari arsip, gudang arsip dan gudang perlengkapan sehingga pelaksanaan kegiatan bisa terganggu	Kepala Bagian Umum, Sub Koordinator Perlengkapan	3	4	12	Menetapkan prioritas pengadaan sarana dan prasarana berdasarkan urgensi dan ketersediaan anggaran			

SEKRETARIS DAERAH


HERMAN AZMAR, AP, M, SI
NIP.19730913 199311 1 001

Tim Evaluasi Risk Register (RR) dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Inspektorat Daerah

- 1 Eliftria, AP/ 19750429 199501 2 001
- 2 Iza Nudia, ST/198205102008032001
- 3 Aldesra, SKM/19721213 200003 1 003
- 4 Reni Za Natalya, S.Sos/ 19830525 200901 2 004
- 5 Saproni, SE/19820621 201001 1 008
- 6 Tri Dia Hapsari, SE/ 19920305 201902 2 008
- 7 Dio Apri Maisya, S.T/ 19950423 202203 1 005



**BERITA ACARA PEMBAHASAN
HASIL EVALUASI REGISTER RISIKO PADA
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di ruang Inspektorat, kami :

- 1 Nama : **IRWANDI,S.Sos, MM, CGCAE, CGRE**
 NIP : 19660913 198603 1 009
 Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Sebagai “Pihak Pertama”

- 2 Nama : **HERMAN AZMAR, AP, M.Si**
 NIP : 19730913 199311 1 001
 Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Sebagai “Pihak Kedua”

Telah mengadakan pembahasan bersama mengenai hasil Evaluasi Risk Register Rencana Tindak Pengendalian Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 dengan hasil sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota telah melakukan pemetaan risiko terhadap 1 (satu) program strategis PD dan 11 (sebelas) kegiatan operasional PD yang bersumber dari dokumen RPJMD/ Renstra OPD sebagai berikut :

Risiko Strategis Pemda (RSP):

- 1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai 4 uraian risiko dengan Skala Risiko 12 .

Risiko Strategis OPD (RSO):

- 1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
- a. Indikator Kinerja Indeks ABS-SBK, mempunyai 4 uraian Risiko dengan skala risiko 12.
 - b. Indikator Kinerja Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai 5 uraian Risiko dengan skala Risiko10,8.
 - c. Indikator Kinerja Jumlah produk Hukum Daerah yang dipublikasikan melalui JDIH, mempunyai uraian 4 Risiko dengan skala Risiko 11,38.
- 2) Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

- d. Indikator Kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah yang tersedia, mempunyai 3 uraian Risiko dengan skala Risiko 9.
 - e. Indikator Kinerja Nilai Komponen Pelaporan Akuntabilitas Kinerja, mempunyai 4 uraian Risiko dengan skala Risiko 12,25
 - f. Persentase Sarana dan Prasarana kantor dalam kondisi baik, mempunyai 5 uraian Risiko dengan skala Risiko 12.
- 3) Program Perekonomian dan Pembangunan dengan skala Risiko 16.
 - 4) Program Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam mempunyai 4 uraian Risiko dengan skala Risiko 11,38.
 - 5) Program Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai 3 uraian Risiko dengan skala Risiko 10.

Risiko Operasional OPD (ROO):

- 1) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai 4 uraian Risiko dengan skala risiko 10,5.
 - 2) Fasilitas Kerja Sama Daerah. Mempunyai 2 uraian Risiko dengan skala risiko 10,5.
 - 3) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, mempunyai 2 uraian Risiko dengan skala risiko 8.
 - 4) Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah, mempunyai 2 uraian Risiko dengan skala risiko 10,5.
 - 5) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, mempunyai 6 uraian Risiko, dengan skala risiko 11.
 - 6) Pembinaan Sumber Daya Manusia, pendampingan, advokasi dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa, mempunyai 4 uraian dengan skala Risiko 12
 - 7) Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik, mempunyai 2 uraian Risiko dengan skala Risiko 10,5.
 - 8) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, mempunyai 4 uraian Risiko dengan skala Risiko 11,38.
 - 9) Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, mempunyai 3 uraian Risiko dengan skala Risiko 10.
 - 10) Fasilitas Keprotokolan, mempunyai 3 uraian Risiko dengan skala Risiko 10.
 - 11) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, mempunyai 2 uraian Risiko dengan skala Risiko 12.
2. Pada Risiko Strategis Pemda terdapat perbaikan/perubahan setelah Evaluasi yaitu :
- 1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
 - a Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ perubahan :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Skala Kemungkinan	3	4
Rencana Tindak Pengendalian	Melaksanakan pelatihan SDM terkait bidang keagamaan	1.Melaksanakan pelatihan SDM Masyarakat terkait bidang keagamaan 2.Mengaktifkan remaja masjid dll

b.Risiko ke-2 terdapat perbaikan/ perubahan :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Sebab	Kurangnya prioritas untuk peningkatan infrastruktur lembaga keagamaan	Kurangnya prioritas untuk peningkatan infrastruktur lembaga keagamaan (TPA/TPSA/MDA)

c. Risiko ke-3 terdapat perbaikan/ perubahan :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Sebab	Masih kurang sumber daya dan regulasi untuk penghimpunan dana dan pemberdayaan sosial ekonomi	1.Masih kurang sumber daya dan regulasi untuk penghimpunan dana dan pemberdayaan sosial ekonomi 2.Kurangnya kesadaran berzakat oleh ASN
Skala Kemungkinan	3	4

3. Pada Risiko Strategis OPD terdapat perbaikan/perubahan setelah Evaluasi yaitu :

1) Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan Indikator Kinerja Indeks ABS-SBK.

a. Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ perubahan :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Skala Kemungkinan	3	4
Rencana Tindak Pengendalian	Melaksanakan pelatihan SDM terkait bidang keagamaan	1.Melaksanakan pelatihan SDM Masyarakat terkait bidang keagamaan 2.Mengaktifkan remaja masjid dll

b. Risiko ke-2 terdapat perbaikan/ perubahan :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Sebab	Kurangnya prioritas untuk peningkatan infrastruktur lembaga keagamaan	Kurangnya prioritas untuk peningkatan infrastruktur lembaga keagamaan (TPA/TPSA/MDA)

c. Risiko ke-3 terdapat perbaikan/ perubahan :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Sebab	Masih kurang sumber daya dan regulasi untuk penghimpunan dana dan pemberdayaan sosial ekonomi	1. Masih kurang sumber daya dan regulasi untuk penghimpunan dana dan pemberdayaan sosial ekonomi 2. Kurangnya kesadaran berzakat oleh ASN
Skala Kemungkinan	3	4

2) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan Indikator Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

a. Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Kode Risiko	RSO.26.01.99.02.01	1. RSO.26.99.02.01
Sumber	Eksternal dan Internal	Internal
C/UC	C	C

b. Risiko ke-2 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Kode Risiko	RSO.26.01.99.02.01	RSO.26.99.02.02
Sumber	Eksternal dan Internal	Internal
C/UC	C	C

c. Risiko ke-3 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Kode Risiko	RSO.26.01.99.02.01	RSO.26.99.02.03
Sumber	Eksternal dan Internal	Internal
C/UC	C	C

d. Risiko ke-4 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Kode Risiko	RSO.26.01.99.02.01	RSO.26.99.02.04
Sumber	Eksternal dan Internal	Internal
C/UC	C	C

e. Risiko ke-5 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Kode Risiko	RSO.26.01.99.02.01	RSO.26.99.02.05
Sumber	Eksternal dan Internal	Internal
C/UC	C	C

3) Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota

a. Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Skala Kemungkinan	3	3

b. Risiko ke-3 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Skala Dampak	2	3
Skala Kemungkinan	4	3

4) Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

a. Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Kode Risiko	RSO.26.99.02	RSO.26.99.02.01
C/UC	C	UC

b. Risiko ke-2 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Kode Risiko	RSO.26.99.02	RSO.26.99.02.02
C/UC	C	UC

c. Risiko ke-3 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Kode Risiko	RSO.26.99.02	RSO.26.99.02.03
C/UC	C	UC

d. Risiko ke-4 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Kode Risiko	RSO.26.99.02	RSO.26.99.02.04
C/UC	C	UC

5) Program Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

a. Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Kode Risiko	RSO.26.99.02.01	RSO.26.27.02.01
Sumber	Eksternal/Internal	Eksternal

b. Risiko ke-2 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Kode Risiko	RSO.26.99.02.01	RSO.26.27.02.02
Sumber	Eksternal/Internal	Eksternal

c. Risiko ke-3 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Kode Risiko	RSO.26.99.02.01	RSO.26.27.02.03
Sumber	Eksternal/Internal	Eksternal

d. Risiko ke-4 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Kode Risiko	RSO.26.99.02.01	RSO.26.27.02.03
Sumber	Eksternal/Internal	Eksternal

6) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Kinerja Persentase Sarana dan Prasarana kantor dalam kondisi baik.

a. Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Sumber	Eksternal	Internal
C/UC	C	C

b. Risiko ke-2 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Sumber	Eksternal	Internal
C/UC	C	C

c. Risiko ke-3 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Sumber	Eksternal	Internal
C/UC	C	C

d. Risiko ke-4 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Sumber	Eksternal	Internal
C/UC	C	C

e. Risiko ke-5 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Sumber	Eksternal	Internal
C/UC	C	C

4. Pada Risiko Strategis OPD terdapat perbaikan/perubahan setelah Evaluasi yaitu :

1) Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

a. Risiko ke-4 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Skala Dampak	3	4

2) Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah

a. Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Kode Risiko	ROO 26.99.02.01	ROO 26.99.02.01

b. Risiko ke-2 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Kode Risiko	ROO 26.99.02.01	ROO 26.99.02.01
Sebab	Kurangnya inisiatif OPD untuk perencanaan kerja sama	Belum adanya pedoman teknis identifikasi dan pemetaan kerja sama
Sumber	Internal dan Eksternal	Internal

3) Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

a. Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Kode Risiko	ROO 26.99.02	ROO 26.99.02.01
Sebab	Kurang paham dalam membaca regulasi	Keterbatasan SDM OPD yang memiliki kompetensi penyusunan Produk Hukum Daerah
Rencana Tindak Pengendalian	Mengumpulkan data sesuai dengan skedul yang ditetapkan	Melaksanakan pendampingan dan konsultasi teknis antara Bagian Hukum dan OPD

4) Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

- Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

a. Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Skala Kemungkinan	3	4

b. Risiko ke-2 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Skala Kemungkinan	3	4

c. Risiko ke-3 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Skala Dampak	2	3
Skala Kemungkinan	2	4

d. Risiko ke-4 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Skala Dampak	2	3
Skala Kemungkinan	2	4

e. Risiko ke-6 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Skala Dampak	2	3

- Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, pendampingan, advokasi dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa

a. Risiko ke-7 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Skala Kemungkinan	3	4

b. Risiko ke-8 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Sebab	Tidak tersedianya anggaran yang memadai untuk kebutuhan peningkatan kapasitas para pelaku pengadaan	Kompetensi dan pemahaman regulasi PBJ pelaku PBJ belum memadai.
Skala Dampak	2	3

c. Risiko ke-9 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Skala Dampak	2	3
Skala Kemungkinan	2	4

d. Risiko ke-10 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Skala Dampak	2	3
Skala Kemungkinan	1	4

- Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik

a. Risiko ke-11 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Skala Dampak	2	3
Skala Kemungkinan	3	4
Rencana Tindak Pengendalian	Tepat waktunya Perangkat Daerah mengumumkan RUP sesuai dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam RKA/DPA Kegiatan	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kelengkapan dan ketepatan waktu pengumuman RUP

b. Risiko ke-12 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Sumber	Sumber	Internal
Skala Dampak	2	3
Rencana Tindak Pengendalian	Terlayannya pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pokja Pemilihan, dan atau Penyedia) yang efektif dan efisien dengan menggunakan media/sarana yang representatif	Menyediakan layanan helpdesk/pendampingan teknis PBJ secara elektronik.

5) Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

a. Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
C/UC	C	UC

b. Risiko ke-2 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
C/UC	C	UC

c. Risiko ke-3 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
C/UC	C	UC

6) Kegiatan Fasilitas Keprotokolan

a. Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Kode Risiko	ROO.26.99.02	ROO.26.99.02.01
Sumber	Eksternal	Internal
C/UC	UC	C

b. Risiko ke-2 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Kode Risiko	ROO.26.99.02	ROO.26.99.02.02
Sumber	Eksternal	Internal
C/UC	UC	C

c. Risiko ke-3 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Kode Risiko	ROO.26.99.02	ROO.26.99.02.03
Sumber	Eksternal	Internal
C/UC	UC	C

7) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Risiko ke-1 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Kode Risiko	ROO.26.99.02	ROO.26.99.02.01
Sebab	Banyaknya kebutuhan Sarana dan Prasarana yang harus disediakan serta anggaran yang terbatas	Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana belum optimal dan belum berbasis analisis kebutuhan
Sumber	Eksternal dan Internal	Internal
C/UC	UC	C
Rencana Tindak Pengendalian	Melakukan Evaluasi serta Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan terkait penyesuaian dan penambahan anggaran	Menetapkan prioritas pengadaan sarana dan prasarana berdasarkan urgensi dan ketersediaan anggaran

b. Risiko ke-2 terdapat perbaikan/ penambahan terhadap :

Uraian	Sebelum Evaluasi	Setelah Evaluasi
Kode Risiko	ROO.26.99.02	ROO.26.99.02.02
Sebab	Terbatasnya anggaran dalam memenuhi sarana dan prasarana partisi kantor, lemari arsip , gudang arsip dan gudang perlengkapan	Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana belum optimal dan belum berbasis analisis kebutuhan
Sumber	Eksternal dan Internal	Internal
C/UC	UC	C
Rencana Tindak Pengendalian	Melakukan Evaluasi serta Berkoordinasi dengan Bagian Keuangan terkait penyesuaian dan penambahan anggaran	Menetapkan prioritas pengadaan sarana dan prasarana berdasarkan urgensi dan ketersediaan anggaran

5. Dalam pemberian Kode Risiko pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 terdapat Perbaikan sebagai berikut:
 - a. Kode Risiko Strategis OPD belum sesuai dengan ketentuan, seharusnya
Kode RSO: RSO.26.99.99.01 (arti kode : Tingkat Risiko. Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko. Jenis Risiko/Urusan Pemda. Entitas/OPD yang menilai. Nomor Urut di Entitas/OPD).
 - b. Kode Risiko Operasional OPD belum sesuai dengan ketentuan, seharusnya
Kode ROO: ROO.26.99.99.01 (arti kode : Tingkat Risiko. Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko. Jenis Risiko/Urusan Pemda. Entitas/OPD yang menilai. Nomor Urut di Entitas/OPD).
6. Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 belum disusun sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tanggal 21 Agustus 2019, yang ada hanya Kertas Kerja Laporan Pelaksanaan Pengendalian Risiko.
7. Diharapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota secara berkelanjutan melakukan pemantauan dan pembaruan jika ada risiko baru yang muncul/belum diidentifikasi oleh manajemen dengan melakukan evaluasi internal atas pernyataan risiko, penilaian risiko dan penilaian rencana tindak pengendalian.

Kedua belah pihak telah sepakat terhadap hasil Evaluasi Risk Register dan Rencana Tindak Pengendalian Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama,

IRWANDI, S.Sos, MM, CGCAE, CGRE
NIP. 19660913 198603 1 009

Pihak Kedua,

HERMAN AZMAR, AP, M.Si
NIP. 19730913 199311 1 001